

Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Kebakaran di Hotel Eks. Kota Administratif Jember

(Overview of Fire Management System Application at Hotel Ex. City of Jember Administrative)

Nasyaa Zainal, Anita Dewi Prahastuti, Ragil Ismi Hartanti
Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121
e-mail korespondensi : zainal.nasyaa@gmail.com

Abstract

The application of fire management system has not been implemented optimally. This is supported by the management of the hotel on fire fighting. The purpose of this study is to explain how the application system of hospitality fire management in Jember. This research was using descriptive research with quantitative approach. The results of this research show that as many as 2 hotels which implementation fire management system. The results of this research shows that of a total of 18 hotels as many as 2 hotels (11,11%) of implementation management system. Hotel has fixed a management policies effective as readiness by forming organization and procedures of fire prevention and fire fighting (72,22%); guidance and emergency response training fires (72,22%); availability of fire protection in the form of a fire detector, fire alarm, APAR, hydrant, and sprinkler (11,11%); performed inspection routine fire within 12 months once (11,11%); control the installation of fire danger in the form of a recommendation (44,44%). Fire management procedure done in the availability of emergency if there is fire. Rehabilitation stage of (11,11%) stages done an audit to evaluate the readiness of fire management system.

Keywords : *Fire Management System*

Abstrak

Penerapan sistem manajemen kebakaran belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini didukung dengan minimnya kesiapan hotel dalam penanggulangan kebakaran. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penerapan sistem manajemen kebakaran di Hotel Eks. Kota Administratif Jember. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dari total 18 hotel sebanyak 2 hotel (11,11%) yang menerapkan sistem manajemen kebakaran. Manajemen hotel telah menetapkan suatu kebijakan berupa kesiapan dengan membentuk organisasi dan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran (72,22%); pembinaan dan pelatihan tanggap darurat kebakaran (72,22%); ketersediaan sarana proteksi kebakaran berupa detektor, alarm, APAR, hidran, dan springkler kebakaran (11,11%); inspeksi kebakaran rutin selama 12 bulan sekali (11,11%); pemasangan himbauan bahaya kebakaran (44,44%). Penanggulangan kebakaran dilakukan (16,67%) berupa ketersediaan prosedur tanggap darurat jika terjadi kebakaran. Tahapan rehabilitasi berupa audit kebakaran dilakukan (11,11%) untuk mengevaluasi kesiapan sistem manajemen kebakaran.

Kata Kunci : Sistem Manajemen Kebakaran

Pendahuluan

Bencana merupakan kejadian yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam, salah satunya adalah kebakaran[1]. Akibat yang ditimbulkan dari

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

peristiwa kebakaran ditempat kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, hilangnya lapangan kerja dan kerugian lain yang tidak langsung, apalagi jika terjadi kebakaran pada objek vital maka dapat berdampak lebih luas lagi.

Penerapan sistem manajemen kebakaran di hotel Eks. Kota Administratif Jember belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini didukung dengan minimnya kesiapan hotel dalam penanggulangan kebakaran. Penerapan sistem manajemen kebakaran harus dilakukan karena hotel merupakan salah satu tempat umum yang setiap hari dikunjungi banyak orang dan orang yang berbeda. Mengelola kebakaran harus dilakukan secara terus-menerus.

Pada perkembangannya, Kabupaten Jember sedang gencar melakukan kegiatan mengembangkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri sudah melakukan beberapa perbaikan dan pembangunan fasilitas tempat pariwisata. Dalam melakukan pengembangan ini Pemerintah Kabupaten Jember menawarkan bentuk kerjasama kepada pihak swasta berupa pembangunan hotel sebagai tempat peristirahatan wisatawan. Seperti diketahui bahwa hotel adalah salah satu tempat umum yang dikunjungi banyak orang dan setiap hari dikunjungi oleh orang selalu berbeda dari hari sebelumnya.

Klasifikasi kebakaran di Indonesia dibagi dalam 4 kelas yaitu bahan padat; bahan cair dan gas; listrik; dan bahan logam[2]. Api adalah proses oksidasi ekshothermal dari bahan bakar yang mudah menyala yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan evolusi dari berbagai intensitas panas dan cahaya. Bahan bakar tersebut dapat berupa padatan, cairan, atau bentuk gas yang mudah menyala. Proses pembakaran selalu terjadi pada fase ketika cairan berubah menjadi uap dan padatan terdekomposisi menjadi gas sebelum terjadinya pembakaran. Konsep pemadaman kebakaran memerlukan teknik pemadaman dan pendinginan; pembatasan oksigen; dan penghilangan bahan bakar.

Salah satu cara yang bias dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan sistem manajemen kebakaran.. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penerapan sistem manajemen kebakaran di Hotel Eks. Kota Administratif Jember. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terus-menerus dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen kebakaran. Tahapannya berupa pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi[3].

Pencegahan kebakaran (*fire prevention*) merupakan tahap strategis, karena dilakukan untuk mencegah agar kebakaran tidak terjadi. Dalam fase

pencegahan ini banyak upaya yang dilakukan. Pertama kali yang dilakukan adalah program pencegahan kebakaran dalam perusahaan harus merupakan keinginan dan sekaligus kebijakan manajemen. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu pengorganisasian dan perencanaan yang baik agar dapat berhasil. Dilakukan identifikasi dan penilaian risiko kebakaran yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Pembinaan dan pelatihan dilakukan karena sebagian besar penyebab kebakaran adalah faktor manusia, maka perlu dilatih dan dibina agar manusia juga memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kebakaran. Sarana proteksi kebakaran adalah sarana perlengkapan atau prasarana yang digunakan dalam keadaan darurat kebakaran seperti penyelamat; alat pertolongan pertama; dan sarana komunikasi yang memadai. Inspeksi kebakaran bertujuan untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, ematuhan, dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur kesadaran semua pihak mengenai bahaya kebakaran[3].

Tahapan selanjutnya adalah penanggulangan kebakaran (*fire fighting*). Jika kebakaran tidak bisa dicegah dan akhirnya terjadi, maka langkah penting yang harus dilakukan adalah untuk mengendalikannya dengan cepat, tepat, dan aman. Tanggap darurat adalah tindakan segera untuk mengatasi kebakaran yang terjadi dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia[3].

Rehabilitasi kebakaran (*fire remediation*) adalah kegiatan operasi harus dipulihkan kembali, korban harus dirawat dan dikembalikan kesehatannya seperti semula, keluarga korban meninggal diberi santunan dan dukungan agar tidak menderita. Penyelidikan dan pelaporan dilakukan agar mengetahui penyebab kebakaran. Audit Kebakaran bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen kebakaran dengan ketentuan atau standar berlaku[3].

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif[4], sasaran penelitian adalah hotel di Eks. Kota Administratif Jember dengan jumlah populasi sebanyak 18 hotel, teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi

dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data diambil pada tanggal 4-24 agustus 2014. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggambarkan penerapan sistem manajemen kebakaran di hotel Eks. Kota Administratif Jember[5].

Hasil Penelitian

Pencegahan Kebakaran (*Fire Prention*)

Hasil penelitian dari gambaran penerapan sistem manajemen kebakaran di Hotel Eks. Kota Administratif Jember menunjukkan sebanyak 2 hotel (11,11%) yang menerapkan sistem manajemen kebakaran sesuai dengan kebijakan manajemen hotel. Sumber risiko kebakaran yang ada di hotel antara lain penggunaan LPG dalam memasak di dapur dan pemanas air dan juga instalasi listrik yang berisiko terjadinya korsleting listrik.

Organisasi dan prosedur yang dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 13 hotel (72,22%). Pembentukan tim penanggulangan kebakaran dilaksanakan sebanyak 6 hotel melaksanakan (33,33%)[6]. Tim di setiap lantai tidak ada namun sebanyak 2 hotel menyatakan ada penanggung jawab di setiap lantainya seperti teknisi dan pelayan jika terjadi kebakaran. Sebanyak 3 hotel (16,67%) menyatakan ada penanggung jawab tim penanggulangan kebakaran yaitu dilakukan oleh satpam sedangkan sebanyak 1 hotel (5,56%) menyatakan penanggung jawabnya adalah teknisi. Sebanyak 4 hotel (22,22%) sudah menerapkan struktur organisasi tim penanggulangan kebakaran. Tim perencana pengamanan kebakaran sudah dilaksanakan oleh 3 hotel (16,67%). Prosedur penanganan kebakaran dilaksanakan oleh 2 hotel (11,11%) yang terdiri dari prosedur pemberitahuan, peringatan, komunikasi, dan tanggap darurat. Seluruh hotel tidak melakukan identifikasi bahaya kebakaran.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil wawancara pada 18 hotel di Eks Kota Administratif Jember dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Hotel Berdasarkan Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran di Hotel Eks. Kota Administratif Jember

No.	Pembinaan dan Pelatihan	Jumlah (Hotel)	Persentase (%)
1.	Pernah dilakukan pelatihan dan pembinaan	13	72,22

2.	Materi yang diberikan peran dan tanggung jawab	9	50
3.	Materi yang diberikan prosedur pemberitahuan, peringatan, komunikasi, dan tanggap darurat	7	38,89
4.	Materi yang diberikan meliputi lokasi peralatan dalam keadaan darurat	12	66,67
5.	Pelatihan yang diberikan penggunaan APAR saat keadaan darurat	13	72,22
6.	Pelatihan yang diberikan pemadaman api saat keadaan darurat	10	55,56
7.	Sosialisasi pentingnya aspek pencegahan	12	66,67

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan berupa peran dan tanggung jawab individu; prosedur pemberitahuan, komunikasi, peringatan, dan tanggap darurat; lokasi tempat peragaan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; penggunaan APAR; dan pemadaman api saat keadaan darurat.

Ketersediaan sarana proteksi kebakaran dengan melihat kondisi, pemasangan, pemeliharaan, lokasi, dan jenisnya. Detektor kebakaran tersedia pada 3 hotel (16,67%) jumlah total sebanyak 68 buah dalam kondisi baik semua. Alarm kebakaran tersedia pada 9 hotel (50%) jenis sirene, bel, dan pengeras suara semuanya dalam kondisi baik dan tidak dilakukan pemeliharaan. Sistem air pemadam terdiri dari sumber air dan penampung; pompa kebakaran; dan jaringan pipa. Hidran tersedia pada 5 hotel (27,78%) jumlah 7 buah dalam kondisi baik dan tidak dilakukan pemeliharaan. Sedangkan untuk ketersediaan lemari hidran tersedia pada 3 hotel (16,67%) jumlah total sebanyak 14 buah (77,78%) warna yang mencolok yaitu berwarna merah semua dan sebanyak 13 buah dalam kondisi baik dan sebanyak 1 buah dalam kondisi rusak.

Springkler kebakaran otomatis tersedia pada 2 hotel (11,11%) jumlah 96 buah dengan kondisi baik dan sebagian tidak diketahui masih berfungsi atau

tidak ada pemeliharaan yang dilakukan. APAR jenis karbondioksida tersedia pada 6 hotel (33,33%) jumlah 12 buah dalam kondisi baik semua dan pemeliharaan dilakukan selama 2 tahun sekali. APAR jenis *dry chemical powder* tersedia pada 17 hotel (94,44%) jumlah total 118 buah dan sebanyak 104 buah dalam kondisi baik. Jarak antar APAR minimal harus 25 meter, mudah dijangkau dan tidak terhalang, lalu digantung di dinding dengan pengait yang kuat dan lebih dari 125 cm dari lantai[7]. Monitor kebakaran tersedia pada 2 hotel (11,11%) kondisi masing-masing baik dan tidak berfungsi sedangkan tidak ada pemeliharaannya.

Kegiatan inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan oleh 14 hotel (77,78%); inspeksi sistem tanggap darurat dilakukan oleh 4 hotel (22,22%); inspeksi terhadap karyawan, manajemen, atau pengunjung mengenai peraturan keselamatan dilakukan pada 3 hotel (16,67%); inspeksi pintu darurat dilakukan pada 5 hotel (27,78%); dan inspeksi kebakaran total yang dilakukan selama 6 kali dilakukan pada 5 hotel (27,78%). Program pengendalian bahaya atau pencegahan kebakaran dilakukan pada 2 hotel (11,11%).

Penanggulangan (*Fire Fighting*)

Penanggulangan kebakaran berupa prosedur tanggap darurat yang harus dilakukan oleh manajemen dan daftar panggil darurat. Tersedia prosedur tanggap darurat pada 3 hotel (16,67%) dan tersedia daftar panggilan darurat (*emergency call*) pada 14 hotel (77,78%).

Rehabilitasi (*Fire Remediation*)

Jika akhirnya terjadi kebakaran, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pelaporan pada pihak berwenang dan penyelidikan terjadinya kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran. Seluruh hotel menyatakan akan melimpahkan tahapan penyelidikan dan pelaporan pada pihak polisi. Jika terjadi kebakaran seluruh hotel menyatakan akan melimpahkan penyelidikan dan pelaporan pada pihak polisi.

Audit kebakaran dilakukan oleh seluruh hotel dengan melihat kesiapan sistem manajemen kebakaran yang sudah ada. Berfungsi untuk melihat dan mengevaluasi sistem manajemen kebakaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan sistem [3].

Pembahasan

Hotel yang menerapkan sistem manajemen kebakaran sebanyak 2 hotel (11,11%). Menurut Ramli (2010) program pengendalian dan penanggulangan kebakaran dalam organisasi atau perusahaan seharusnya merupakan kebijakan manajemen. Pihak manajemenlah sesungguhnya yang berkepentingan dengan upaya pencegahan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, manajemenlah sebenarnya pihak yang menanggung akibat terbesar. Bisnisnya akan terganggu, operasi terhenti, mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak perlu untuk memperbaiki kerusakan, biaya pengobatan dan ganti rugi [1]. Sebanyak 16 hotel (88,89%) belum menerapkan sistem manajemen kebakaran. Seharusnya manajemen hotel menerapkan sistem manajemen kebakaran untuk menghindari kerugian materi maupun nonmateri.

Organisasi dan prosedur yang dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 13 hotel (72,22%). Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik agar dapat berhasil. Pengendalian kebakaran juga harus dikelola dan dikoordinir dengan baik, karena akan melibatkan banyak pihak dari berbagai fungsi [8]. Hal ini sesuai dengan Kepmenaker RI No.186/Men/1999 tentang unit penanggulangankebakaran di tempat kerja[6].

Identifikasi bahaya kebakaran tidak dilakukan oleh seluruh hotel karena pihak hotel menganggap tidak pernah terjadi kebakaran, risiko kebakaran kecil, dan membuang tenaga. Identifikasi risiko bahaya kebakaran berfungsi untuk mengetahui apa masalah atau lawan yang akan dihadapi maka program pengendalian dan penanggulangan kebakaran tidak akan berhasil dengan baik [3].

Pembinaan dan pelatihan penanggulangan kebakaran sudah pernah dilakukan sebanyak 13 hotel dengan persentase (72,22%). Materi yang diberikan antara lain mengenai teknik penanggulangan kebakaran, teknik penyelamatan, P3K, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik menyelamatkan diri, dan lainnya. Materi yang harus diberikan saat pelatihan pemadam kebakaran adalah mengenai peran dan tanggung jawab individu; prosedur pemberitahuan, komunikasi, peringatan, dan

tanggap darurat; lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; penggunaan APAR; dan pemadaman api saat keadaan darurat. Pelatihan dan pembinaan dilakukan oleh pihak PMK dan Disnakertrans Kabupaten Jember untuk melatih karyawan hotel dalam penanggulangan kebakaran. Faktor manusia menjadi penyebab kebakaran yang paling besar. Namun selain sebagai penyebab, manusia juga berperan penting dalam upaya penanggulangan jika kebakaran terjadi [3]. Maka dari itu perlunya pembinaan dan pelatihan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama di hotel Eks. Kota Administratif Jember.

Detektor kebakaran tersedia di 3 hotel (16,67%). Sistem proteksi kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana operasional untuk mencegah, mengeliminasi, serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung [2]. Seharusnya alarm kebakaran dilakukan pemeliharaan dan uji berkala minimal 1 kali selama 1 tahun dengan melakukan percobaan fungsi dan berbunyi atau tidak.

Hidran tersedia di 5 hotel (27,78%). Hidran adalah salah satu penyalur air yang terpasang di beberapa lokasi. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan air ke lokasi kebakaran misalnya sebagai koneksi slang pemadam kebakaran atau mobil pemadam kebakaran [8]. Seluruh lemari hidran berwarna mencolok yaitu berwarna merah dan pemasangan diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Sistem springkler kebakaran otomatis terdiri dari rangkaian pipa yang dilengkapi dengan ujung penyemprot (*discharge nozzle*) yang kecil (sering disebut springkler head) dan ditempatkan dalam suatu bangunan. Jika terjadi kebakaran maka panas dari api akan melelehkan sambungan solder atau memecahkan bulb, kemudian kepala springkler akan mengeluarkan air. Pemeliharaan yang dilakukan berupa melihat sambungan solder yang berfungsi untuk memecahkan bulb yang kemudian kepala springkler akan mengeluarkan air.

Sarana Proteksi kebakaran yang lengkap ada 2 hotel (11,11%). Meliputi detektor, alarm, APAR, hidran, dan springkler. APAR tersedia dalam 2 jenis yaitu karbondioksida dan *dry chemical powder*. APAR jenis karbondioksida tersedia di 3 hotel (16,67%) dan APAR jenis *dry chemical powder* tersedia di 17 hotel (94,44%). APAR adalah alat pemadam yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh satu

orang[3]. Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR[6]. Pemasangan APAR mayoritas di hotel Eks. Kota Administratif Jember diletakkan menempel pada dinding dengan pengait yang kuat. Penempatan APAR jenis karbondioksida ini diletakkan di dekat mesin genset dan dapur. Pemeliharaan APAR yang dilakukan langsung dari PMK Eks. Kota Administratif Jember yang rutin dilakukan selama 2 tahun sekali.

Inspeksi kebakaran total dilakukan selama 12 bulan sekali sebanyak 2 hotel (11,11%). Inspeksi kebakaran ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, pematuhan, dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan kebakaran [3]. Sehingga jika terjadi kebakaran diharapkan petugas tidak panik, bekerja sama, dan mampu menggunakan alat pemadam yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan sistem proteksi kebakaran, sistem tanggap darurat, dan pintu darurat.

Pengendalian bahaya dilakukan oleh 2 hotel (11,11%). Upaya paling penting dilakukan dalam pengendalian bahaya atau pencegahan adalah mencegah kebakaran atau menghindarkan terjadinya kebakaran melalui program pencegahan. Perilaku manusia seringkali tidak peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Seperti merokok di sembarang tempat dan membuang puntung rokok sembarangan[7]. Hal ini memerlukan tempat khusus untuk merokok agar orang lain tidak merasa terganggu dan menghindari pembuangan puntung rokok yang masih menyala. Di beberapa hotel sudah menyediakan asbak yang menggunakan media pasir untuk mematikan nyala api. Namun walaupun ada area untuk merokok tersendiri, beberapa hotel diantaranya memperbolehkan merokok di area manapun di hotel. Bahkan di area yang menggunakan AC diperbolehkan untuk merokok dan tidak ada teguran dari karyawan hotel. Salah satu cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi berupa rambu-rambu keselamatan dan bahaya kebakaran dalam bentuk poster, himbauan, dan lainnya.

Penanggulangan kebakaran dilakukan oleh 3 hotel (16,67%) berupa ketersediaan prosedur tanggap darurat. Bila akhirnya kebakaran terjadi dan tidak bisa dicegah, maka langkah paling penting yang harus dilakukan adalah mengendalikannya dengan

cepat, tepat, dan aman. Langkah ini hanya dapat dilakukan melalui proses tanggap darurat yang baik dan terencana. Tanggap darurat harus dilakukan tindakan segera dengan sumber daya yang tersedia, sebelum bantuan dari luar datang [3]. Daftar panggil darurat (*emergency call*) yang harus dihubungi saat terjadi kebakaran juga tertera di daerah yang mempunyai risiko kebakaran tinggi. Seperti dapur, parkir kendaraan (*basement*), dan ruang makan atau restoran.

Seluruh hotel menyatakan akan melimpahkan penyelidikan dan pelaporan jika terjadi kebakaran kepada pihak eksternal dalam hal ini yang menangani adalah polisi. Penyelidikan kebakaran dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Sehingga di masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengambil langkah pencegahan yang tepat. Tanpa mengetahui penyebab kebakaran dan tidak melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan, maka kebakaran berikutnya akan terulang kembali[3]. Kecil besarnya kejadian kebakaran harus dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib yaitu polisi. Pelaporan ini dilakukan oleh pihak yang mengetahui kejadian kebakaran kepada pihak internal maupun eksternal. Seharusnya dari pihak internal juga melakukan penyelidikan agar lebih melihat dan mengetahui penyebab kebakaran.

Audit kebakaran dilakukan melalui 3 tahapan dilakukan oleh seluruh hotel menyatakan audit kebakaran. Audit sistem manajemen kebakaran (*management system audit*) untuk mengetahui sistem pelaksanaan perundangan atau standar yang berlaku dalam bidang kebakaran. Audit pemenuhan perundangan (*compliance audit*) untuk mengaudit kesesuaian pelaksanaan perundangan atau standar yang berlaku dalam bidang kebakaran. Audit teknis (*technical audit*) dilakukan untuk mengaudit kondisi teknis tertentu, misalnya audit bangunan gedung, pompa kebakaran, dan lainnya[8]. Audit kebakaran dilakukan untuk mengevaluasi sistem manajemen kebakaran yang sudah ada[3]. Audit kebakaran dilakukan hanya oleh pihak internal saja. Seharusnya pihak eksternal seperti Disnakertrans dan PMK Kabupaten Jember ikut dilibatkan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hotel Eks. Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pencegahan kebakaran

(*fire prevention*) belum menjadi kebijakan manajemen; organisasi dan prosedur sudah terbentuk pada bagian satpam; identifikasi bahaya kebakaran tidak dilaksanakan; pembinaan dan pelatihan dilakukan oleh PMK Kabupaten Jember; sistem proteksi kebakaran sebanyak 17 hotel menyediakan APAR sedangkan beberapa hotel menyediakan detektor, alarm, hidran, springkler, monitor kebakaran; sebanyak 2 hotel dilakukan inspeksi kebakaran semalam 6 bulan sekali; dan pengendalian bahaya atau pencegahan dilakukan pengendalian sumber bahan bakar dengan menggunakan tutup regulator LPG sesuai SNI. 2) Penanggulangan kebakaran (*fire fighting*) berupa tersedianya prosedur tanggap darurat sebanyak 3 hotel dan sebanyak 14 hotel menyediakan daftar panggilan darurat (*emergency call*) di setiap kamar hotel dan tempat-tempat yang berisiko terjadi kebakaran seperti lobi, dapur, restoran, dan parkir (*basement*). 3) Rehabilitasi (*fire remediation*) dilakukan oleh pihak polisi berupa penyelidikan jika terjadi kebakaran untuk mencari penyebab kebakaran dan pelaporan dilakukan oleh karyawan hotel sedangkan untuk audit kebakaran juga dilakukan oleh polisi dengan melakukan audit sistem manajemen kebakaran, audit pemenuhan perundangan, dan audit teknis. Tahap rehabilitasi (*fire remediation*) hanya berdasarkan hasil wawancara dengan manajer hotel dan semua menyatakan akan melimpahkan sepenuhnya kepada pihak polisi, karena belum pernah terjadi kebakaran dan belum pernah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) Bagi masing-masing hotel diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen kebakaran meliputi pencegahan kebakaran (*fire prevention*), penanggulangan kebakaran (*fire fighting*), dan rehabilitasi (*fire remediation*) agar karyawan dan pengunjung hotel selaku konsumen dapat terjamin keselamatannya sedangkan untuk pemilik hotel tidak mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran sudah siap dalam penanggulangan kebakaran. 2) Bagi PMK Kabupaten Jember hendaknya melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai penerapan sistem manajemen kebakaran di hotel khususnya di Kabupaten Jember dalam upaya sosialisasi mengenai pentingnya penerapan sistem manajemen kebakaran yang bermanfaat untuk

mencegah terjadinya kebakaran sewaktu-waktu yang mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. 3) Bagi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan PHRI mewajibkan penerapan sistem manajemen kebakaran setiap tahapan pencegahan kebakaran (*fire prevention*), penanggulangan kebakaran (*fire fighting*), dan rehabilitasi (*fire remediation*) sebagai syarat dasar izin pendirian hotel. 4) Melakukan sosialisasi mengenai penerapan sistem manajemen kebakaran di hotel agar hotel mendapatkan manfaat berupa dapat menekan kerugian sekecil mungkin jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Daftar Pustaka

- [1] Novianty P. Tugas Akhir: Analisis Manajemen dan Sistem Proteksi Kebakaran di PT. Bridgestone Tire Indonesia. Depok : FKM Universitas Indonesia; 2012.
- [2] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009. Tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan. Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; 2009.
- [3] Ramli S. 2010. Manajemen Kebakaran. Jakarta: PT. Dian Rakyat; 2010.
- [4] Notoadmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
- [5] Nazir M. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia; 2009.
- [6] Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.186/MEN/1999. Tentang Unit Penanggulangan di Tempat Kerja. Indonesia: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia; 1999.
- [7] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 04/MEN/1980. Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Indonesia: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 1980.
- [8] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011. Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel. Indonesia: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 2011.
- [9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja. Indonesia: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia; 1970.